

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2022 telah selesai disusun. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dokumen LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 disusun untuk menggambarkan pencapaian kinerja urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Kendati demikian, dalam teknis penyusunannya ditemui beberapa kendala terkait data dan informasi. Namun, hal ini menjadi pelajaran untuk bahan evaluasi dalam penyusunan LAKIP selanjutnya.

Akhir kata, kami ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga, bahkan data sehingga laporan ini bisa terselesaikan dengan baik. Kami sangat membuka ruang untuk menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna penyempurnaan LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk masa yang akan datang. Diharapkan, laporan ini akan menjadi tolok ukur kinerja yang realistis dan dapat menjadi cambuk bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih maksimal di tahun – tahun berikutnya.

Pangkalpinang, Januari 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG

EDDY SUPRIADI, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196701272005011002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang ..	6
1.3 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8
1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP	13
1.5 Landasan Hukum	14
1.6 Sistematika Penyusunan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Visi dan Misi	16
2.2 Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17
2.3 Indikator Kinerja Utama	21
2.4 Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja	32
3.2 Analisis Capaian Kinerja	36
3.3 Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota pangkalpinang.....	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota pangkalpinang.....	9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan jabatan	9
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Di Lingkungan DIKBUD Pangkalpinang berdasarkan Jabatan	10
Tabel 1.5	Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Berdasarkan status kepegawaian.....	10
Tabel 1.6	Jumlah Tenaga Pendidik/guru berdasarkan Usia di sekolah Negeri dan swasta.....	11
Tabel 1.7	Jumlah Tenaga Pendidik/guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Sekolah.....	12
Tabel 1.8	Jumlah Tenaga Kependidikan Kota pangkalpinang.....	12
Tabel 2.1	Target Kinerja Tahun 2020	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja 2020.....	33
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran	51
Tabel 3.3	Kegiatan Yang Tidak Terealisasi Lebih Dari 70%.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berikutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan setelah melalui proses panjang dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan konsisten sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang dimaksudkan untuk menindaklanjuti amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan kembali ke dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Dengan adanya peraturan walikota ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan beberapa penyesuaian diantaranya berubahnya nama Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan type A.

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang adalah merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Penetapan rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya pada bawahan;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
6. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan yang membawahi:

1. Sekretaris;
2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
4. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
5. Bidang Kebudayaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi unit kerja utama (jabatan Administrator) dibagi habis ke dalam kelompok pelaksana (jabatan Pengawas), sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris, secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1.2. Sub Bagian Keuangan;
 - 1.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP).
2. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 2.1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2.2. Seksi Pendidikan Non Formal;
 - 2.3. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal.
3. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 3.1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 3.2. Seksi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter;
 - 3.3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
4. Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Ketenagaan secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 4.1. Seksi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- 4.2. Seksi PTK PAUD, Pendidikan NonFormal dan Tenaga Kebudayaan;
- 4.3. Seksi PTK Pendidikan Dasar.
5. Tugas pokok dan fungsi Bidang Kebudayaan secara hirarki dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 5.1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 5.2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 5.3. Seksi Kesenian dan Perfilman
6. Tugas khusus, dibagi habis ke dalam rentang kendali dan tata kerja:
 - 6.1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Kepala Sekolah/Guru TK, SD, SMP
 - b. Guru Pamong Sanggar Kegiatan Belajar
 - c. Pengawas Sekolah, yang terdiri dari :
 - Penilik (PAUD)
 - Pengawas Pendidikan Dasar (TK dan SD)
 - Pengawas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - 6.2. Unit Pelaksana Teknis

1.3 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.3.1 Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Tahun 2020

NO	UNIT	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	68	38	106
2	SKB	14	14	28
3	TK NEGERI	28	29	57
4	SD NEGERI	423	349	772
5	SMP NEGERI	291	158	449
JUMLAH		761	558	1.412

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DIKBUD Tahun 2020

1.3.2 Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	NON GOLONGAN	-	-	-	-	38
2	I	-	-	-	-	-
3	II	-	-	-	4	4
4	III	6	12	9	18	45
5	IV	6	13	-	-	19
JUMLAH		12	25	9	22	106

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DIKBUD Tahun 2020

1.3.3 Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1	STRUKTURAL	49
2	FUNGSIONAL UMUM	49
3	FUNGSIONAL TERTENTU	19
4	PHL	38
JUMLAH		155

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DIKBUD Tahun 2020

1.3.4 Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S 3	0
2	S 2	12
3	S 1	43
4	D 3	6
5	D 2	0
6	D 1	0
7	SMA/ sederajat	7
8	SMP	0
JUMLAH		68

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DIKBUD Tahun 2020

1.3.5 Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.5
Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH		JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		NEGERI	SWASTA		PNS	NON PNS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SKB	1	0	1	11	10	21
2	SPS	0	12	12	0	30	30
3	TPA	0	9	9	0	41	41
4	KB	0	15	15	0	28	28

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH		JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		NEGERI	SWASTA		PNS	NON PNS	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	TK	6	57	63	24	300	324
6	SD	66	20	86	560	511	1071
7	SMP	10	16	26	253	245	498
JUMLAH		83	129	212	848	1.165	2.013

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DIKBUD Tahun 2020

1.3.6 Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang berdasarkan Status Usia

Tabel 1.6

Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang Berdasarkan Usia di Sekolah Negeri Dan Swasta Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	USIA				Total
		<30	31-49	50 - 55	>56	
1	2	3	4	5	6	7
1	SKB	6	13	2	0	21
2	SPS	9	15	5	1	30
3	TPA	29	10	2	0	41
4	KB	12	15	1	0	28
5	TK	136	152	30	6	324
6	SD	313	405	185	168	1071
7	SMP	119	238	98	43	498
JUMLAH		624	848	323	218	2.013

Sumber : Dapodik Tahun 2020

1.3.7 Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Sekolah Negeri

Tabel 1.7
Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN								Total
		SMP	SMA/	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
			Sederajat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SKB	0	0	0	0	0	0	21	0	21
2	SPS	0	22	0	0	0	1	7	0	30
3	TPA	0	30	1	0	1	0	9	0	41
4	KB	0	12	2	0	1	0	13	0	28
5	TK	1	107	4	5	19	0	188	0	324
6	SD	0	87	0	39	11	0	928	6	1071
7	SMP	1	8	3	7	7	3	452	17	498
JUMLAH		2	266	10	51	39	4	1618	23	2013

Sumber : Dapodik Tahun 2020

1.3.8 Jumlah Data Tenaga Kependidikan Kota Pangkalpinang

Tabel 1.8
Jumlah Tenaga Kependidikan Kota Pangkalpinang
Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH		JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		NEGERI	SWASTA		PNS	NON PNS	
1	SKB	1	0	1	3	4	7
2	SPS	0	12	12	0	14	14
3	TPA	0	9	9	0	10	10

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH		JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		NEGERI	SWASTA		PNS	NON PNS	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	KB	0	15	15	0	28	28
5	TK	6	57	63	11	116	127
6	SD	66	20	86	87	333	420
7	SMP	10	16	26	39	169	208
JUMLAH		83	129	212	140	674	814

Sumber : Dapodik Tahun 2020

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran. Lakip juga merupakan media akuntabilitas yang dibuat secara periodik dan memuat informasi yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan selama pelaksanaan prrogram dan kegiatan sebagai fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Berdasarkan maksud di atas, maka tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, dan seberapa besar capaian program dan kegiatan tersebut dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Selain itu, penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak secara hierarki juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan yang lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;

- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.5 Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2019 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja.

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, pernyataan dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah Organisasi Perangkat Daerah yang turut mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Adapun visi Kota Pangkalpinang untuk tahun 2018 – 2023 adalah “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur)”.

Perwujudan visi di atas kemudian diwujudkan ke dalam Misi :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*;
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai perangkat daerah yang diamanahkan urusan pendidikan dan kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mengimplementasikan misi ketiga dan keempat Kota Pangkalpinang sebagaimana disebutkan di atas.

Berdasarkan visi dan misi di atas, prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi sektor unggulan
2. Peningkatan iklim investasi
3. Peningkatan produktivitas, daya saing dan potensi komoditas lokal berbasis ekonomi kreatif
4. Penanggulangan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial kemasyarakatan

5. Optimalisasi penanggulangan dan mitigasi bencana serta pementapan stabilitas keamanan dan ketertiban
6. Perbaikan tata kelola pemerintahan dalam percepatan reformasi birokrasi
7. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender
8. Peningkatan daya saing dan pelestarian seni budaya daerah
9. Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya daerah.

Sebagai eksekutor kebijakan Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsi yang mendukung prioritas pembangunan terkait peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan daya saing dan pelestarian budaya daerah. Beberapa tantangan yang harus diselesaikan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah menyediakan akses pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pada bidang kebudayaan, tantangan utama yang harus diselesaikan adalah upaya untuk mengembangkan dan melindungi cagar budaya daerah, mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah serta melestarikan sejarah dan tradisi budaya daerah.

2.2. Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 telah mengacu kepada Renstra baru yaitu Renstra periode Tahun 2018-2023. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang harus dicapai disusun dalam dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang 2018 -2023 dengan

memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang tepat. Untuk tahun 2020, sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
1	Tersedia dan terjangkaunya akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi anak usia dini, Pendidikan Non Formal, remaja dan orang dewasa putus sekolah	01.01	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (0-6)	Persen	50,96
		01.02	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	Persen	1,96
		01.03	Persentase Sarana dan Prasarana PAUD dalam kondisi baik	Persen	78,00
		01.04	Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A	Persen	13,60
		01.05	Persentase Capaian SPM PAUD	Persen	100,00
2	Tersedia dan terjangkaunya akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi Pendidikan Dasar	02.01	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	Persen	106,99
		02.02	Persentase Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik	Persen	88,00
		02.03	Persentase Sarana dan		72,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Prasarana SMP dalam kondisi baik	Persen	
		02.04 Persentase satuan DIKDAS yang terakreditasi A	Persen	58,18
		02.05 Persentase sekolah hijau (adiwiyata) minimal tingkat propinsi	Persen	8,00
		02.06 Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	Persen	0,02
		02.07 Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	0,18
		02.08 Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD)	Persen	100,00
		02.09 Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	100,00
		02.10 Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Dasar (SD)	Persen	100,00
		02.11 Angka Melanjutkan Siswa Sekolah	Persen	100,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Menengah Pertama (SMP)		
		02.12 Persentase Capaian SPM DIKDAS	Persen	100,00
3	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	03.01 Persentase guru PAUD, PNF yang berkualifikasi S1/DIV	Persen	39,28
		03.02 Persentase guru PAUD, PNF yang bersertifikat pendidik	Persen	24,57
		03.03 Persentase guru DIKDAS yang berkualifikasi S1/DIV	Persen	93,91
		03.04 Persentase guru DIKDAS yang bersertifikat pendidik	Persen	47,47
		03.05 Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru PAUD Nilai diatas 70	Persen	22,49
		03.06 Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru DIKDAS Nilai diatas 70	Persen	15,03
4	Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.	04.01 Persentase pengelolaan dan pelaporan	Persen	100,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
		dana BOS /BOP			
5	Terlestarinya budaya benda (cagar budaya dan Permuseuman) serta Pemajuan budaya tak benda (seni, sejarah dan tradisi)	05.01	Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	Persen	12,00
		05.02	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen	9,00
		05.03	Persentase sejarah dan tradisi yang dilestarikan	Persen	11,00
6	Tersedianya Sistem Tatakelola dan SDM yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima	06.01	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,00

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) dibuat dengan tujuan sebagai petunjuk arah untuk mencapai sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, IKU dibuat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di samping itu, IKU juga merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk level unit organisasi setara eselon II, IKU yang ditetapkan sekurang-kurangnya berupa indikator keluaran (output). IKU disusun sebagai dasar untuk penyusunan Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang pada tahun 2020.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3		4	5	6
1.	Tersedianya dan terjangkaunya akses pendidikan serta meningkatnya aktifitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi anak usia dini, Pendidikan Non Formal, remaja dan orang dewasa putus sekolah	1.1	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (0-6 Tahun)	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		1.3	Persentase Sarana dan Prasarana PAUD dalam kondisi baik	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		1.4	Persentase Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		1.5	Persentase Capaian SPM PAUD	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
2	Tersedia dan Terjangkaunya Akses Pendidikn Serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi Pendidikan Dasar	2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		2.2	Presentasi Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		2.3	Persentasi Sarana dan Prasarana SMP dalam kondisi baik	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
		2.4	Persentase Satuan DIKDAS yang terakreditasi A	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		2.5	Persentase Sekolah Hijau (Adiwiyata) minimal tingkat provinsi	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		2.6	Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		2.7	Angka Putus Sekolah Dasar (SMP)	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		2.8	Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD)	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		2.9	Angka Kelulusan Sekolah Menengah (SMP)	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		2.10	Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Dasar (SD)	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		2.11	Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		2.12	Persentase Capaian SPM DIKDAS	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
3	Tersedianya Tenaga Pendidik Dan Kependidikan yang bermutu	3.1	Persentase guru PAUD, PNF yang berkualifikasi S1/DIV	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		3.2	Persentase guru PAUD, PNF yang bersertifikat pendidik	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	
		3.3	Persentase guru DIKDAS yang	DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			berkualifikasi S1/DIV		
		3.4	Persentase guru DIKDAS yang bersertifikat pendidik	Data DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020
		3.5	Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru PAUD Nilai diatas 70	Data DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020
		3.6	Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru DIKDAS Nilai diatas 70	Data DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020
4	Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan	4.1	Persentase pengelolaan dan pelaporan dana BOS /BOP	Data DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020
5	Terlestariannya budaya benda (cagar budaya dan permuseuman) serta Pemajuan budaya tak benda 9seni,sejarah dan tradisi)	5.1	Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	Data DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020
		5.2	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Data DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020
		5.3	Persentase sejarah dan tradisi yang dilestarikan	Data DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020
6	Tersedianya Sistem Tata Kelola dan SDM yang haandaal dalam menjamin	6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data DIKBUD PKP 2020	Data DIKBUD PKP 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	terselenggaranya layanan prima				

2.4. Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pernyataan Perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang adalah bentuk pernyataan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sebagai PIHAK PERTAMA dan Walikota Pangkalpinang sebagai PIHAK KEDUA dimana PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun Perwujudan pernyataan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang tahun 2020 adalah dengan menetapkan target indikator kinerja tahun sesuai dengan sasaran strategis.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Tersedia dan terjangkau akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi anak usia dini, Pendidikan Non Formal, remaja dan orang dewasa putus sekolah	1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (0-6)	50,96%	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Jumlah Anak didik PAUD 0- 6 tahun : Jumlah Penduduk 0-6 Tahun x 100. • Tipe perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	1,96%	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah peserta didik Pendidikan kesetaraan (Paket A,B,C) : Jumlah penduduk usia 7 - 15 Tahun x 100 • Tipe perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		1.3 Persentase Sarana dan Prasarana PAUD dalam kondisi baik	78,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik : jumlah sarana dan prasarana PAUD yang tersedia x 100 • Tipe perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		1.4 Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A	13,60%	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A : Jumlah satuan PAUD dan PNF yang ada x 100 • Tipe perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		1.5 Persentase Capaian SPM PAUD	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah indikator SPM PAUD yang tercapai : indikator SPM PAUD yang harus dicapai x 100

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan SPM
2.	Tersedia dan terjangkau akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi Pendidikan Dasar	2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	106,99%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah siswa Dikdas (SD dan SMP) : jumlah penduduk usia 7-15 Tahun x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		2.2 Persentase Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik	88,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik : jumlah sarana dan prasarana SD yang tersedia x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		2.3 Persentase Sarana dan Prasarana SMP dalam kondisi baik	72,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik : jumlah sarana dan prasarana SMP yang tersedia x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		2.4 Persentase satuan DIKDAS yang terakreditasi A	58,18%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah satuan Dikdas yang terakreditasi A : Jumlah satuan Dikdas yang ada x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		2.5 Persentase sekolah hijau (adiwiyata) minimal tingkat propinsi	8,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sekolah hijau (adiwiyata) : Jumlah sekolah yang ada x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
		2.6 Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	0,02%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah siswa putus sekolah SD : jumlah siswa seluruh tahun sebelumnya x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		2.7 Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0,18%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah siswa putus sekolah SMP : jumlah siswa seluruh tahun sebelumnya x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		2.8 Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD)	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peserta lulus SD : jumlah peserta yang ikut ujian x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		2.9 Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peserta lulus SMP : jumlah peserta yang ikut ujian x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		2.10 Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Dasar (SD)	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah siswa baru SD : jumlah lulusan Tingkat sebelumnya x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		2.11 Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah siswa baru SMP : jumlah lulusan Tingkat sebelumnya x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
		2.12 Persentase Capaian SPM DIKDAS	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah indikator SPM DIKDAS yang tercapai : indikator SPM DIKDAS yang harus dicapai x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan SPM
3.	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	3.1 Persentase guru PAUD, PNF yang berkualifikasi S1/DIV	39,28%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV : Jumlah guru PAUD dan PNF x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		3.2 Persentase guru PAUD, PNF yang bersertifikat pendidik	24,57%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah guru PAUD dan PNF yang bersertifikat pendidik : Jumlah guru PAUD dan PNF x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		3.3 Persentase guru DIKDAS yang berkualifikasi S1/DIV	93,91%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah guru SD dan SMP yang berkualifikasi S1/DIV : Jumlah guru SD dan SMP x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		3.4 Persentase guru DIKDAS yang bersertifikat pendidik	47,47%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah guru DIKDAS yang bersertifikat pendidik: Jumlah guru DIKDAS dan PNF x 100
		3.5 Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru PAUD Nilai diatas 70	22,49%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah guru PAUD yang mendapat nilai >70 : Jumlah guru PAUD yang mengikuti PKB x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		3.6 Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru	15,03%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah guru DIKDAS yang mendapat nilai >70 : Jumlah guru DIKDAS yang

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
		DIKDas Nilai diatas 70		<ul style="list-style-type: none"> mengikuti PKB x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.	4.1 Persentase pengelolaan dan pelaporan dana BOS /BOP	100%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah realisasi anggaran BOS/BOP : Anggaran BOS/BOP x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Realisasi Dana BOS
5.	Terlestarinya budaya benda (cagar budaya dan Permuseuman) serta Pemajuan budaya tak benda (seni, sejarah dan tradisi)	5.1 Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	12,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah cagar budaya yang teregistrasi nasional : Jumlah cagar budaya x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		5.2 Persentase seni budaya yang dilestarikan	9,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah seni budaya yang dilestarikan : Jumlah seni budaya x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
		5.3 Persentase sejarah dan tradisi yang dilestarikan	11,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sejarah dan tradisi yang dilestarikan : jumlah sejarah dan tradisi x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Profil Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Tersedianya Sistem Tatakelola dan SDM yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima	6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kepuasan masyarakat : jumlah kunjungan masyarakat x 100 Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Surver Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) kegiatan dengan besaran anggaran

atau belanja langsung sebesar Rp 67,228,132.194,- (*enam puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).

Sementara Pada tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan dengan besaran anggaran atau belanja langsung yakni sebesar 64,134,000,000,- (*enam puluh empat milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh rupiah*). Dengan perjanjian kinerja terlampir dalam laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tahun 2020 ditentukan dengan proses pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Adapun Kerangka pengukuran kinerja yang berdasar pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja (*performance result*) 2020 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedia dan terjangkau akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi anak usia dini, Pendidikan Non Formal, remaja dan orang dewasa putus sekolah	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (0-6)	Persen	50,96	16,40	32,18
		2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	Persen	1,96	3,33	169,90
		3 Persentase Sarana dan Prasarana PAUD dalam kondisi baik	Persen	78,00	78,00	100,00
		4 Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A	Persen	13,60	10,09	74,19
		5 Persentase Capaian SPM PAUD	Persen	100,00	71,00	71,00
2	Tersedia dan terjangkau akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi Pendidikan Dasar	6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	Persen	106,99	110,29	103,08
		7 Persentase Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik	Persen	88,00	86,43	98,22

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		8 Persentase Sarana dan Prasarana SMP dalam kondisi baik	Persen	72,00	78,63	109,21
		9 Persentase satuan DIKDAS yang terakreditasi A	Persen	58,18	43,20	74,25
		10 Persentase sekolah hijau (adiwiyata) minima I tingkat propinsi	Persen	8,00	7,39	92,38
		11 Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	Persen	0,02	0,08	400,00
		12 Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	0,18	0,26	144,44
		13 Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD)	Persen	100,00	99,95	99,95
		14 Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	100,00	91,06	91,06
		15 Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Dasar (SD)	Persen	100,00	92,21	92,21
		16 Angka Melanjutkan		100,00	104,31	104,31

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen			
		17 Persentase Capaian SPM DIKDAS	Persen	100,00	111,00	111,00
3	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu	18 Persentase guru PAUD, PNF yang berkualifikasi S1/DIV	Persen	39,28	29,92	76,17
		19 Persentase guru PAUD, PNF yang bersertifikat pendidik	Persen	24,57	15,48	63,00
		20 Persentase guru DIKDAS yang berkualifikasi S1/DIV	Persen	93,91	89,38	95,18
		21 Persentase guru DIKDAS yang bersertifikat pendidik	Persen	47,47	40,35	85,00
		22 Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru PAUD Nilai diatas 70	Persen	22,49	95,00	422,41
		23 Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru DIKDAS Nilai diatas 70	Persen	15,03	87,60	582,83
4	Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.	24 Persentase pengelolaan dan pelaporan dana BOS /BOP	Persen	100,00	75,95	75,95

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
5	Terlestariannya budaya benda (cagar budaya dan Permuseuman) serta Pemajuan budaya tak benda (seni, sejarah dan tradisi)	25	Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	Persen	12,00	60,00	500,00
		26	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen	9,00	75,00	833,33
		27	Persentase sejarah dan tradisi yang dilestarikan	Persen	11,00	50,00	454,55
6	Tersedianya Sistem Tata kelola dan SDM yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima	28	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,00	49,47	61,84

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pada setiap pernyataan kinerja sasaran terdapat indikator kinerja utama yang harus dilakukan analisis capaian kinerja, yaitu :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menetapkan **6 (enam) sasaran strategis** dengan **28 (dua puluh delapan)** indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020. Berikut tingkat ketercapaian **6 (enam) sasaran strategis** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang selama tahun 2020.

3.2.1. Sasaran 1

Tersedia dan terjangkaunya akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi anak usia dini, Pendidikan Non Formal, Remaja dan Orang Dewasa Putus Sekolah.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur hasil capaian akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang di tahun 2020. Dukungan atau peran serta masyarakat pada capaian akses Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar, ikut menentukan ketercapaian indikator ini. Adapun indikator pendukung sasaran ini sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar PAUD (0-6 tahun) dengan target sebesar 50,96% dan **realisasi sebesar 16,40%**, sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 34,56% dengan capaian sebesar 32,18%. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan kondisi pandemi covid 19 yang berdampak hingga kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Pangkalpinang. Menurunnya pendapatan masyarakat mempengaruhi keputusan orangtua untuk menunda atau bahkan tidak mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan PAUD. Di sisi lain, orangtua yang berkecukupan dari segi ekonomi pun turut mempertimbangkan kondisi covid 19 terhadap keputusan mereka menyekolahkan anaknya dengan alasan resiko penularan covid 19. Dikarenakan kondisi tersebut, realisasi indikator ini jauh menurun dibandingkan dengan **tahun 2019 yaitu sebesar 50,6 %**.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan dengan target sebesar 1,96% dan **realisasi sebesar 3,33%** sehingga indikator ini sudah melewati target sebesar 1,37% dengan capaian 169,90%. Melonjaknya realisasi indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan siswa kesetaraan yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian indikator ini tidak hanya yang berasal dari Kota Pangkalpinang, melainkan juga berasal dari kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Banyaknya penduduk dari luar Kota Pangkalpinang yang berpartisipasi pada lembaga pendidikan kesetaraan yang ada di Kota Pangkalpinang menyebabkan capaian indikator ini melebihi target yang telah ditentukan. Selain itu, realisasi indikator ini juga lebih besar bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yang hanya sebesar 2,51 %**.

3. Persentase Sarana dan Prasarana PAUD dalam kondisi baik dengan target sebesar 78,% dan **realisasi sebesar 78,00%** sehingga indikator ini sudah memenuhi target dengan capaian 100%. Realisasi indikator ini konsisten dengan capaian pada **tahun 2019 yang juga sebesar 100%**.
4. Persentase Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A dengan target sebesar 13,60% dan **realisasi sebesar 10,09%** sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 0,51% dengan capaian sebesar 74,19%. Tidak maksimalnya capaian indikator ini disebabkan masih banyak satuan PAUD swasta yang belum terakreditasi A, dikarenakan setiap satuan PAUD swasta memiliki kemampuan sumber daya dan dana yang berbeda-beda untuk mengupayakan tercapainya akreditasi A bagi sekolah mereka. Meskipun demikian, realisasi indikator pada tahun 2020 lebih baik bila dibandingkan dengan realisasi **pada tahun 2019 yang hanya sebesar 8,27%**.
5. Persentase Capaian SPM PAUD dengan target sebesar 100% dan **realisasi sebesar 71,00%** sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 29% dengan capaian sebesar 71,00%. Senada dengan faktor yang melatarbelakangi rendahnya capaian APK PAUD, kondisi pandemi Covid 19 turut mempengaruhi capaian indikator ini. Selain itu, banyak anak yang masih di dalam usia PAUD telah ikut serta pada jenjang pendidikan dasar sehingga tidak ikut diperhitungkan dalam penghitungan SPM PAUD. Kondisi ini menyebabkan realisasi indikator ini turun bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yang mencapai 96,17%**.

Dari kelima indikator di atas, rata-rata capaian untuk sasaran pertama ini sebesar 89,46%. Adapun kelima indikator tersebut diupayakan melalui pelaksanaan Program Penyediaan Akses dan Peningkatan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal dengan anggaran Rp.1.742.847.270,00 serta dukungan kegiatan-kegiatan suportif sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal dengan alokasi dana sebesar Rp.54.375.000,00;

2. Penyediaan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dengan alokasi dana sebesar Rp.60.000.000,00 dari sumber dana APBD;
3. Pengembangan Mutu Layanan Kelembagaan PAUD dengan alokasi dana sebesar Rp.114.186.000,00 dari sumber dana APBD;
4. Peningkatan Mutu Layanan Sarana PAUD dan PNF dengan alokasi dana sebesar Rp.184.000.000,00 dari sumber dana APBD;
5. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan alokasi dana sebesar Rp.162.073.000,00 dari sumber dana APBD;
6. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SKB dengan alokasi dana sebesar Rp.523.900.000,00 dari sumber dana APBD;
7. Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD dengan alokasi dana sebesar Rp.644.313.270,00 dari sumber dana APBN (DAK);

3.2.2. Sasaran 2

Tersedia dan terjangkau akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi Pendidikan Dasar.

Sasaran ini ditetapkan sebagai patokan untuk efektifitas dan relevansi layanan pendidikan di Kota Pangkalpinang sehingga pelayanan pendidikan dapat diukur sejauh mana yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Adapun indikator pendukung sasaran ini sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (7-15 tahun) dengan target sebesar 106,99% dan **realisasi sebesar 110,29%**, sehingga indikator ini sudah melewati target sebesar 3,30% dengan capaian sebesar 103,08%. Realisasi indikator ini lebih baik bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yang hanya sebesar 102%**.
2. Presentase Sarana Dan Prasarana SD dalam kondisi baik dengan target sebesar 88,00% dan **realisasi sebesar 86,43%**, sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 1,57% dengan capaian hanya mencapai 98,22%. Realisasi indikator ini lebih baik bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yang hanya sebesar 75,59%**.
3. Persentase Sarana dan Prasarana SMP dalam kondisi baik dengan target sebesar 72,00% dan **realisasi sebesar 78,63%**, sehingga indikator ini sudah melebihi target sebesar 6,63% dengan capaian hanya mencapai 109,21%. Meskipun

demikian, realisasi indikator ini menurun bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yaitu sebesar 94,19%**.

4. Persentase Satuan Satuan DIKDAS yang terakreditasi A dengan target sebesar 58,18% dan **realisasi sebesar 43,20%**, sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 14,98% dengan capaian sebesar 74,25%. Realisasi indikator ini juga menurun bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yaitu sebesar 48,74%**.
5. Persentase Sekolah Hijau (Adiwiyata) minimal tingkat propinsi dengan target sebesar 8,00% dan **realisasi sebesar 7,39%**, sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 0,39% dengan capaian sebesar 92,38%. Realisasi indikator ini tidak dibandingkan dengan **tahun 2019 dikarenakan indikator yang digunakan berbeda, sehingga tidak dapat dipersandingkan**.
6. Angka Putus Sekolah Dasar (SD) dengan target sebesar 0,02% dan **realisasi sebesar 0,08%**, sehingga indikator ini melebihi target sebesar 0,06. Realisasi indikator ini secara kinerja menurun bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yang sebesar 0,02%**. Dengan artian, jumlah siswa putus sekolah pada tahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2019.
7. Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan target sebesar 0,18% dan **realisasi sebesar 0,26%**, sehingga indikator ini melebihi target sebesar 0,08%. Dari sisi kinerja, realisasi indikator tahun ini lebih baik bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yaitu sebesar 0,28%**. Dengan artian, jumlah siswa putus sekolah pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020.
8. Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD) dengan target sebesar 100,00% dan **realisasi sebesar 99,95%**, sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 0,05% dengan capaian sebesar 99,95%. Realisasi indikator ini sedikit menurun bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yaitu sebesar 100%**.
9. Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan target sebesar 100,00% dan **realisasi sebesar 91,06%**, sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 8,94% dengan capaian sebesar 91,06%. Realisasi indikator ini sedikit menurun bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yaitu sebesar 100%**.
10. Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Dasar (SD) dengan target sebesar 100,00% dan realisasi **sebesar 92,21%**, sehingga indikator ini belum memenuhi target sebesar 7,79% dengan capaian sebesar 92,21%. Realisasi indikator ini sedikit menurun bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yaitu sebesar 102,7%**.

11. Angka Melanjutkan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan target sebesar 100,00% dan **realisasi sebesar 104,31%**, sehingga indikator ini sudah melebihi target sebesar 4,31% dengan capaian sebesar 104,31%. Realisasi indikator ini sedikit menurun bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yaitu sebesar 114,67%**.
12. Persentase Capaian SPM DIKDAS dengan target sebesar 100,00% dan **realisasi sebesar 111%**, sehingga indikator ini sudah melebihi target sebesar 11% dengan capaian sebesar 111%. Realisasi indikator ini lebih baik bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yang hanya sebesar 100,8%**.

Adapun dukungan anggaran untuk sasaran ini melalui pelaksanaan Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 9.225.104.608,00, dengan kegiatan – kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dengan alokasi dana sebesar Rp.408.145.039,00 dari sumber dana APBD;
2. Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan Dasar dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.390.190.500,00 dari sumber dana APBD;
3. Peningkatan Mutu Layanan Sarana Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar dengan alokasi dana sebesar Rp. 511.499.615,00 dari sumber dana APBD;
4. Peningkatan Kualitas Peserta Didik Pendidikan Dasar dengan alokasi dana sebesar Rp. 38.280.000,00 dari sumber dana APBD;
5. Penerimaan Peserta Didik Baru dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.700.000,00 dari sumber dana APBD;
6. Pembangunan Pras Belajar SD dengan alokasi dana sebesar Rp. 895.829.704,00 dari sumber dana APBN (DAK) dan APBD (Dana Pendamping);
7. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.788.144.272,00 dari sumber dana APBN (DAK) dan APBD (Dana Pendamping);
8. Pengadaan Sarana Belajar SD dengan alokasi dana sebesar Rp.1.089.286.000,00 dari sumber dana APBN (DAK) dan APBD (Dana Pendamping);
9. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP dengan alokasi dana sebesar Rp.1.090.559.378.00 dari sumber dana APBN (DAK) dan APBD (Dana Pendamping);

10. Pengadaan Sarana Belajar SMP dengan alokasi dana sebesar Rp.1.006.470.100,00 dari sumber dana APBN (DAK) dan APBD (Dana Pendamping).

3.2.3 Sasaran 3

Tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bermutu.

Sasaran ini ditetapkan dalam meningkatkan efektivitas dan relevansi mutu pendidikan yang harus ditunjang dengan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu dan memenuhi kualifikasi minimal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai sasaran ini, telah ditentukan indikator pendukung yang menunjang sasaran dimaksud diantaranya :

1. Persentase guru PAUD, PNF yang berkualifikasi S1/DIV dengan target sebesar 39,28% dan **realisasi sebesar 29,92%** . Capaian indikator ini sebesar 76,17%. Belum maksimalnya capaian indikator ini dikarenakan masih terdapat guru di satuan pendidikan swasta yang belum berkualifikasi S1/DIV. Hal ini mempengaruhi perhitungan capaian indikator karena yang diperhitungkan tidak hanya guru yang ada di satuan pendidikan negeri tapi juga pada satuan pendidikan swasta. Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang terbatas, menjadi salah satu faktor penghambat sulitnya mengintervensi peningkatan kompetensi pendidikan guru di satuan pendidikan swasta, sehingga peningkatan kompetensi tersebut mengandalkan swakelola dari satuan pendidikan itu sendiri. Realisasi indikator ini juga menurun secara signifikan bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yaitu sebesar 59,91%**.
2. Persentase guru PAUD, PNF yang bersertifikat pendidik dengan target sebesar 24,57% dan **realisasi sebesar 15,48%**, yang berarti belum memenuhi target sebesar 9,09%. Adapun capaian indikator ini sebesar 63,00%. Senada dengan indikator pertama, belum maksimalnya capaian indikator ini dikarenakan masih terdapat guru di satuan pendidikan swasta yang belum bersertifikat pendidik. Meskipun demikian, realisasi indikator ini lebih baik bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yang hanya sebesar 10,55%**.
3. Persentase guru DIKDAS yang berkualifikasi S1/DIV dengan target sebesar 93,91% dan **realisasi sebesar 89,38%**. Adapun capaian indikator ini sebesar 95,18%. Realisasi indikator ini lebih baik dari **tahun 2019 yang hanya sebesar 86,86%**.

4. Persentase guru DIKDAS yang bersertifikat pendidik dengan target sebesar 47,47% dimana **realisasi sebesar 40,35%**, yang berarti belum memenuhi target sebesar 7,12%. Capaian indikator ini sebesar 85,00%. Realisasi indikator ini lebih baik bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yang hanya sebesar 37,00%**.
5. Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru PAUD Nilai diatas 70 dengan target sebesar 22,49%. **Realisasi target ini sebesar 95%**. Adapun capaian indikator ini sebesar 422,41%. Realisasi indikator ini juga konsisten dengan yang dicapai pada **tahun 2019 yaitu sebesar 95% pula**.
6. Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru DIKDAS Nilai diatas 70 dengan target sebesar 15,03%, dimana **realisasi indikator ini sebesar 87,60%**. Adapun capaian indikator ini sebesar 582,83%. Realisasi indikator ini lebih baik bila dibandingkan dengan **tahun 2019 yang hanya sebesar 87,60%**.

Pencapaian indikator sasaran ini diupayakan melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 17.311.700.150,00. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.171.200.000,00 dari sumber dana APBD Provinsi.
2. Pengembangan Mutu PTK dalam pemanfaatan TIK dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.183.900,00 dari sumber dana APBD.
3. Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 54.144.500,00 dari sumber dana APBD.
4. Pengembangan Mutu PTK DIKDAS dengan alokasi dana sebesar Rp. 93.840.900,00 dari sumber dana APBD.
5. Pengelolaan GTK PAUD dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.981.950.000,00 dari sumber dana APBD.
6. Pengelolaan GTK DIKDAS dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.987.380.850,00 dari sumber dana APBD.

3.2.4 Sasaran 4

Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan

Sasaran ini di tetapkan sebagai patokan untuk efektifitas dan relevansi layanan pendidikan di Kota Pangkalpinang sehingga pelayanan pendidikan dapat diukur sejauh mana yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Untuk mencapai sasaran ini, indikator yang ditetapkan " Persentase Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS/BOP", dengan target sebesar 100%, dan **realisasi sebesar 75,97%**, dengan capaian sebesar 75,97%. Realisasi indikator ini sedikit menurun dibandingkan dengan **tahun 2019 yang mencapai 82,54%**.

Adapun dukungan atas pencapaian indikator sasaran di atas diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan rincian sebagai berikut

Program Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, dengan anggaran sebesar Rp. 521.000.000,00 dan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Tamansari Pangkalpinang dengan alokasi dana sebesar Rp. 54.000.000,00 dari sumber dana APBN (DAK).
2. Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1 Pangkalpinang dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.600.000,00 dari sumber dana APBN (DAK).
3. Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.600.000,00 dari sumber dana APBN (DAK).
4. Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2 Pangkalpinang dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.400.000,00 dari sumber dana APBN (DAK).
5. Manajemen BOP PAUD dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00 dari sumber dana APBN (DAK).
6. Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3 Pangkalpinang dengan alokasi dana sebesar Rp. 51.600.000,00 dari sumber dana APBN (DAK).
7. Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Rangkui Pangkalpinang dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.000.000,00 dari sumber dana APBN (DAK).
8. Pengelolaan Dana BOP di TKN Model Pangkalpinang dengan alokasi dana sebesar Rp. 43.800.000,00 dari sumber dana APBN (DAK).
9. Pengelolaan Dana BOP di SKB Pangkalpinang dengan alokasi dana sebesar Rp. 114.000.000,00 dari sumber dana APBN (DAK).

Program Pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) dengan anggaran sebesar Rp 65.000.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut:

Manajemen BOS DIKDAS dengan alokasi dana sebesar Rp 65.000.000,00.

3.2.5. Sasaran 5

Terlestarinya budaya benda (cagar budaya dan permuseuman) serta Pemajuan budaya tak benda (seni, sejarah dan tradisi)

Sasaran ini ditetapkan sebagai bentuk tanggungjawab Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada urusan Kebudayaan. Budaya benda dan tak benda menjadi satu kesatuan sebagai aset daerah yang dinilai patut dijaga kelestariannya. Untuk mengukur sasaran ini, telah ditentukan indikator pendukung yaitu :

1. Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional dengan target sebesar 12,00% dan **realisasi sebesar 60,00%**. Capaian indikator ini sebesar 500%. Pada saat penentuan target indikator ini, prosedur registrasi atas benda yang diduga cagar budaya sangat kompleks sehingga penetapan angka target belum bisa maksimal. Namun mulai tahun 2020, proses registrasi tersebut dimudahkan, sehingga capaian dari indikator ini melebihi target yang ditetapkan. Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi **tahun 2019 dikarenakan indikator yang digunakan berbeda, sehingga tidak dapat dipersandingkan.**
2. Persentase seni budaya yang dilestarikan dengan target sebesar 9,00% dimana realisasi sebesar 75,00%. Capaian indikator ini melonjak hingga 833,33%. Senada dengan indikator pertama, realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi **tahun 2019 dikarenakan indikator yang digunakan berbeda, sehingga tidak dapat dipersandingkan.**
3. Persentase sejarah dan tradisi yang dilestarikan dengan target sebesar 11,00% dan realisasi sebesar 50,00% . Capaian indikator ini sebesar 454,55%. Sama halnya dengan realisasi kedua indikator di atas, realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan **tahun 2019 dikarenakan indikator yang digunakan berbeda, sehingga tidak dapat dipersandingkan.**

Untuk mencapai target indikator tersebut, pada tahun 2020 telah diupayakan pelaksanaan Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan

Tak Benda dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.173.814.000,00 Besaran alokasi tersebut sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan :

1. Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman dengan pagu sebesar Rp.297.600.000,00 dari sumber dana APBD.
2. Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah dengan pagu sebesar Rp.991.600.000,00 dari sumber dana APBD.
3. Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi dengan pagu sebesar Rp.884.614.000,00 dari sumber dana APBD.

Pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya dan permuseuman sebanyak 45 (empat puluh lima) cagar budaya Kota Pangkalpinang yang telah diregistrasi akhirnya ditetapkan di tingkat Nasional. Penetapan cagar budaya yang sebelumnya diregistrasi tersebut merupakan langkah awal dalam mewujudkan upaya pemeliharaan atas aset daerah tersebut. Adapun pada tahun 2020, cagar budaya yang telah diregistrasi dan ditetapkan tersebut di antaranya :

NO	CAGAR BUDAYA
1	Rumah Kolonial
2	Lapangan olahraga (kolam renang dan tenis)
3	Rumah direksi PT. Timah
4	Rumah Tradisional No. Reg 13
5	Panti Jompo No. Reg 12
6	Perumahan pertambangan timah
7	Rumah Sakit DKT Pangkal Pinang
8	Rumah dan Apotek No. Reg 08
9	Apotek Bangka
10	Rumah Tradisional No. Reg. 04
11	Rumah Tradisional No. Reg. 03
12	Rumah Tradisional 2
13	Rumah Tradisional 1
14	Makam Boen Ngim Foek
15	Tugu Pendiri Makam Sentosa
16	Kelenteng Amal Bhakti/Kwan Tie Miao
17	Sekolah TK, SD, SMP, Budhi Mulya
18	Rumah Tipe 1
19	Rumah Tipe 2
20	Jembatan Gantung
21	Makam Boen Men Chiew
22	Rumah Residen
23	Rumah Sakit Bhakti Timah

NO	CAGAR BUDAYA
24	Kantor Residen (Resident Cantoor)
25	RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara)
26	Post, Telegraaf En Telefoondienst (PTT)
27	HCS (Hollandsch-Chineesche School)/ SMP Negeri 1 Pangkalpinang
28	Kompleks Pemakaman Umum Sentosa
29	Masjid Al Mukarrom
30	Perigi Pekasem
31	Tugu Pergerakan Kemerdekaan
32	Gedung Nasional
33	Kuburan Akek Bandang
34	Makam Belanda (Kerkhof)
35	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
36	Panti Wangka
37	Wisma Timah Satoe
38	Tamansari (Wilhelmina park)
39	Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang / RS. Pusat BTW
40	Masjid Jami'
41	Gereja GPIB Maranatha Pangkalpinang
42	Gereja Kathedral Santo Yoseph
43	Menara Air Minum
44	Museum Timah Indonesia
45	Rumah Residen

Berkembangnya budaya tak benda (seni, sejarah dan tradisi)

Sasaran ini ditetapkan sebagai bentuk tanggungjawab Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada urusan Kebudayaan khususnya budaya tak benda menjadi satu kesatuan sebagai aset daerah yang dinilai patut dijaga kelestariannya. Untuk mengukur sasaran ini, telah ditentukan indikator pendukung yaitu :

1. Jumlah seni budaya yang dilestarikan
2. Jumlah sejarah dan tradisi yang dilestarikan

Sementara itu, ragam sejarah dan tradisi serta kesenian yang dilestarikan diantaranya seperti yang diuraikan di bawah ini :

Ragam Kesenian Kota Pangkalpinang yang Dilestarikan

NO	KESENIAN
1.	Kesenian Tradisional Tari
	1. Dambus

NO	KESENIAN
	2. Campak
	3. kedidi
	4. Tari Sambut
2.	Kesenian Musik Tradisional
	1. Musik Dambus
	2. Musik Campak
	3. Musik Hadrah
	4. Musik Rebana
	5. Musik Melayu
3.	Seni Sastra
	1. Pantun
	2. Cerita Rakyat
	3. Hikayat
4.	Teater Tradisional
	1. Begisah
5.	Seni Rupa
	1. Tudong Dulang
	2. Dambus

Ragam Sejarah dan Tradisi Kota Pangkalpinang yang Dilestarikan

NO	TRADISI DAN SEJARAH
1	Permainan Rakyat
	1. Gasing
	2. Pangka' Igi' Karet
	3. Maen Igi' Saga'
	4. Tak Tek
	5. Maen Setal
	6. Sembunyi' Gong
	7. Maen Yeye
	8. Maen Cak Lingking

NO	TRADISI DAN SEJARAH
2	Olah Raga Tradisional
	1. Egrang
	2. Maen Bilun
	3. Nyurong Kerito Surong
	4. Bakiyak
	5. Pencak Silat
3	Panganan
	1. Martabak bangka
	2. Bong Li Piang
	3. Rinta Sagu
	4. Rangai
	5. Jungkong
	6. Otak - Otak
	7. Asinan Kelubi
	8. Tew Fu Sui
	9. Roti papan Bangka
	10. Kelamai Ubi
	11. Kroket
	12. Empe Empe Bangka
	13. Bergo Ubi
	14. Opak Ubi
	15. Kerupuk Bangka
	16. Getas
	17. Kricu
	18. Kemplang Bangka
	19. Gule Gule Kabong
	20. Gule Kabong
	21. Lempok Cempedak
	22. Lempok Durin
	23. Jemput Cempedak
	24. Lempah Kuneng
	25. Lempah Darat
	26. Pangut Pari
	27. Rusep
	28. Calu'
	29. Kipeng Ubi
	30. Lakso Bangka
	31. Pantiaw bangka
	32. Rujak So Un
	33. Mie Kua Ikan
	34. Tekwan Bangka

NO	TRADISI DAN SEJARAH
	35. Model Bangka
	36. Tumis Alar Keladi
	37. Sambel Belacan
	38. Gandos
	39. Yet - yet
	40. Sengkulon Ubi
	41. Sengkulon Kelapa
	42. Selada Bangka
	43. Gembung Betelo'
	44. Tumis Pucuk Ubi
	45. Tumis Pucuk Katis
	46. Lempah Rebong
	47. Lempah Kulat
	48. Tumis Kulat
	49. Tumis Jantong Pisang
	50. Tew Fu fa

3.2.6 Sasaran 6

Tersedianya Sistem Tata Kelola dan SDM yang Handal Dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur tingkat profesionalitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai eksekutor pelaksana program prioritas kepala daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan haruslah menjadi yang terdepan dalam hal memajukan dunia pendidikan dan aset kebudayaan di Kota Pangkalpinang. Untuk mengukur sasaran ini, telah ditentukan indikator pendukung yaitu : "Indeks Kepuasan Masyarakat". Target indikator ini sebesar 80 %, **dengan realisasi 49,47%**. Dengan demikian, capaian untuk indikator ini sebesar 61,84%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi indikator ini sedikit menurun dimana pada **tahun 2019 indikator ini terrealisasi sebesar 50,7%**.

program yang dilaksanakan diantaranya:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp. 1.746.240.243,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp. 1.468.441.999,00

3. program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah anggaran Rp 32.500.000,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dengan jumlah anggaran Rp. 304.551.676,00

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
REALISASI ANGGARAN

RINCIAN BELANJA	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5
BELANJA	191.456.938.562,88	169.093.354.300,00	(22.363.584.262,88)	88,32%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	127.322.938.562,88	126.726.304.484,00	(596.634.078,88)	99,53%
Non Kegiatan	127.322.938.562,88	126.726.304.484,00	(596.634.078,88)	99,53%
Belanja Pegawai	127.322.938.562,88	126.726.304.484,00	(596.634.078,88)	99,53%
BELANJA LANGSUNG	34.591.199.946,00	33.290.112.549,00	(1.301.087.397,00)	96,24%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.746.240.243,00	1.684.902.013,00	(61.338.230,00)	96,49%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	365.400.000,00	344.329.988,00	(21.070.012,00)	94,23%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	947.225.000,00	922.645.000,00	(24.580.000,00)	97,41%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	78.506.000,00	76.866.750,00	(1.639.250,00)	97,91%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.500.000,00	15.147.000,00	(2.353.000,00)	86,55%
Penyediaan alat tulis kantor	33.175.000,00	31.552.000,00	(1.623.000,00)	95,11%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	128.879.850,00	127.223.750,00	(1.656.100,00)	98,72%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.230.000,00	7.681.000,00	(3.549.000,00)	68,40%
Penyediaan makanan dan minuman	26.960.000,00	25.528.000,00	(1.432.000,00)	94,69%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	137.364.393,00	133.928.525,00	(3.435.868,00)	97,50%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.468.441.999,00	1.361.038.063,00	(107.403.936,00)	92,69%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	220.000.000,00	215.400.000,00	(4.600.000,00)	97,91%
Pengadaan peralatan gedung kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00%
Pemeliharaan gedung kantor	84.761.200,00	83.475.500,00	(1.285.700,00)	98,48%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	134.710.000,00	92.333.613,00	(42.376.387,00)	68,54%

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020

RINCIAN BELANJA	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5
dinas/operasional				
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	13.275.000,00	10.290.000,00	(2.985.000,00)	77,51%
Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	1.007.695.799,00	951.538.950,00	(56.156.849,00)	94,43%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	32.500.000,00	30.400.000,00	(2.100.000,00)	93,54%
Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan	32.500.000,00	30.400.000,00	(2.100.000,00)	93,54%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	304.551.676,00	291.556.600,00	(12.995.076,00)	95,73%
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.935.000,00	1.920.000,00	(15.000,00)	99,22%
penyusunan laporan keuangan akhir tahun	3.400.000,00	3.380.000,00	(20.000,00)	99,41%
Pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Kebudayaan	113.966.100,00	106.222.100,00	(7.744.000,00)	93,20%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	62.097.000,00	61.647.000,00	(450.000,00)	99,28%
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan	20.000.000,00	16.775.000,00	(3.225.000,00)	83,88%
Bimtek Penatausahaan Keuangan sekolah	103.153.576,00	101.612.500,00	(1.541.076,00)	98,51%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.311.700.150,00	16.885.438.650,00	(233.061.500,00)	97,54%
Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar	1.171.200.000,00	978.000.000,00	(38.600.000,00)	83,50%
Pengembangan Mutu PTK dalam Pemanfaatan TIK	23.183.900,00	23.183.900,00	-	100,00 %
Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan	54.144.500,00	54.144.500,00	-	100,00 %
Pengembangan Mutu PTK DIKDAS	93.840.900,00	93.840.900,00	-	100,00 %
Pengelolaan GTK PAUD	1.981.950.000,00	1.943.350.000,00	(38.600.000,00)	98,05%
Pengelolaan GTK Dikdas	13.987.380.850,00	13.792.919.350,00	(194.461.500,00)	98,61%
Program pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda	2.173.814.000,00	1.964.712.610,00	(209.101.390,00)	90,38%
Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman	297.600.000,00	269.490.600,00	(28.109.400,00)	90,55%
Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah	991.600.000,00	934.176.000,00	(57.424.000,00)	94,21%
Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi	884.614.000,00	761.046.010,00	(123.567.990,00)	86,03%
Program penyediaan akses dan Mutu layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal	1.742.847.270,00	1.719.113.012,00	(23.734.258,00)	98,64%
Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal	54.375.000,00	54.375.000,00	-	100,00 %
Penyediaan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	60.000.000,00	59.660.000,00	(340.000,00)	99,43%
Pengembangan Mutu Layanan Kelembagaan PAUD	114.186.000,00	111.814.000,00	(2.372.000,00)	97,92%
Peningkatan Mutu Layanan Sarana Paud dan PNF	184.000.000,00	184.000.000,00	-	100,00 %
Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	162.073.000,00	145.123.000,00	(16.950.000,00)	89,54%

RINCIAN BELANJA	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SKB Pangkalpinang	523.900.000,00	519.829.422,00	(4.070.578,00)	99,22%
Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK FISIK)	644.313.270,00	644.311.590,00	(1.680,00)	100,00 %
Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD	521.000.000,00	462.495.500,00	(58.504.500,00)	88,77%
Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Tamansari Pangkalpinang	54.000.000,00	50.700.000,00	(3.300.000,00)	93,89%
Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1 Pangkalpinang	66.600.000,00	63.600.000,00	(3.000.000,00)	95,50%
Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang	24.600.000,00	18.489.500,00	(6.110.500,00)	75,16%
Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2 Pangkalpinang	50.400.000,00	47.650.000,00	(2.750.000,00)	94,54%
Manajemen BOP PAUD	50.000.000,00	49.000.000,00	(1.000.000,00)	98,00%
Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3 Pangkalpinang	51.600.000,00	40.556.000,00	(11.044.000,00)	78,60%
Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Rangkui Pangkalpinang	66.000.000,00	57.850.000,00	(8.150.000,00)	87,65%
Pengelolaan Dana BOP di TKN Model Pangkalpinang	43.800.000,00	38.050.000,00	(5.750.000,00)	86,87%
Pengelolaan Dana BOP di SKB Pangkalpinang	114.000.000,00	96.600.000,00	(17.400.000,00)	84,74%
Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)	65.000.000,00	64.925.000,00	(75.000,00)	99,88%
Manajemen BOS DIKDAS	65.000.000,00	64.925.000,00	(75.000,00)	99,88%
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan pendidikan dasar	9.225.104.608,00	8.825.531.101,00	(399.573.507,00)	95,67%
Peningkatan Akses pendidikan dasar	408.145.039,00	404.108.000,00	(4.037.039,00)	99,01%
Peningkatan Mutu Layanan Sarana Pendidikan dasar	1.390.190.500,00	1.340.559.900,00	(49.630.600,00)	96,43%
Peningkatan Mutu Layanan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan dasar	511.499.615,00	503.635.115,00	(7.864.500,00)	98,46%
Peningkatan Kualitas Peserta Didik Pendidikan Dasar	38.280.000,00	38.280.000,00	-	100,00 %
Penerimaan Peserta Didik Baru	6.700.000,00	-	(6.700.000,00)	0,00%
Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK FISIK)	895.829.704,00	883.528.000,00	(12.301.704,00)	98,63%
Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK FISIK)	2.788.144.272,00	2.773.414.000,00	(14.730.272,00)	99,47%
Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK FISIK)	1.089.286.000,00	913.426.470,00	(175.859.530,00)	83,86%
Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)	1.090.559.378,00	967.307.900,00	(123.251.478,00)	88,70%
Pengadaan sarana Belajar SMP(DAK FISIK)	1.006.470.100,00	1.001.271.716,00	(5.198.384,00)	99,48%
JUMLAH	191.456.938.562,88	169.093.354.300,00	(22.363.584.262,88)	88,32%

Terdapat beberapa program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang tidak terealisasi lebih dari 70 % karena alasan sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Kegiatan yang tidak terealisasi lebih dari 70 %

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	PENYEBAB
1	2	3	4	5	6
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.230.000	7.681.000	68,40	Alokasi anggaran untuk belanja pemeliharaan genset tidak digunakan. Alokasi yang sedianya untuk berjaga-jaga terjadinya kerusakan genset tidak digunakan karena kondisi genset sampai akhir tahun anggaran tidak mengalami kerusakan
24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	134.710.000	92.333.613	68,54	Kondisi pandemi covid 19 turut berpengaruh pada kebutuhan mobilitas ASN, sehingga mobilitas keluar ASN menggunakan kendaraan dinas/operasional menjadi berkurang dan berimbas kepada tidak maksimalnya serapan anggaran bahan bakar dan pemeliharaan
8	Penerimaan Peserta Didik Baru	6.700.000	0	0	Anggaran ini sedianya dipersiapkan untuk operasional/administrasi kegiatan penerimaan peserta didik baru. Namun dikarenakan kondisi Pandemi Covid 19 dan tidak dimungkinkan dilakukan penerimaan peserta didik baru secara tatap muka, maka dibuatlah aplikasi Online Penerimaan Peserta Didik Baru yang tidak membutuhkan anggaran untuk biaya operasional/administrasi

Tidak maksimalnya serapan anggaran ketiga kegiatan tersebut menjadi catatan penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk perencanaan program dan kegiatan Tahun 2021. Diharapkan berbagai kendala yang diuraikan di atas dapat diatasi sehingga pada saat realisasi pelaksanaan di Tahun 2021, capaian target dapat maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk tahun 2020 dilihat dari pengukuran atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dari 6 sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan dengan 28 indikator kinerja yang harus dicapai, terdapat 13 indikator yang memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan dan 15 indikator yang tidak memenuhi target yang ditetapkan. Rata-rata pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan 184,83%. Angka capaian melebihi 100% disebabkan terdapat beberapa program/kegiatan dengan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan pada saat penyusunan dokumen perencanaan. Untuk sasaran yang **belum tercapai** masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut, serta diperlukan analisa yang lebih mendalam dalam penentuan target yang akan dicapai.

Dari sisi anggaran, total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020 sebesar Rp. 191.456.938.562,88 lebih kecil dari anggaran tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 203.488.362.368,44. Adapun capaian realisasi anggaran tercatat sebesar 88,32%. Berdasarkan capaian tersebut, secara garis besar kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang bila dilihat dari sisi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dari sisi penyerapan anggaran menurun dibandingkan tahun 2019, dimana pada tahun tersebut capaian realisasi anggaran sebesar 94,67%.

LAMPIRAN - LAMPIRAN